

# Ecces

Economics, Social, and Development Studies

---

---

ANALISIS KEUNTUNGAN PETERNAK SISTEM GADUHAN DI DESA POGALAN  
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG

*Rohmat Putranto*

PENINGKATAN KAPASITAS USAHA MIKRO OLAHAN PANGAN DI KABUPATEN  
BANJARNEGARA, JAWA TENGAH

*Istiqomah, Krisnhoe Rachmi Fitrijati, Uswatun Hasanah*

PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA MELALUI INVESTASI SWASTA TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI

*Andi Ika Fahraka*

PENINGKATAN KUNTITAS PRODUKSI DAN KUALITAS SDM PADA KELOMPOK  
KERAJINAN BAMBU DESA SOMAKATON  
KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS

*Sri Martini Dyah Perwita Sofiatul Khotimah*

PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DAN KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI  
TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN

*Zulkifli*

DETERMINAN INVESTASI PADA SEKTOR PERUMAHAN DI KOTA MAKASSAR PERIODE  
2002-2013

*Siradjuddin dan Nurlaela*

PEMETAAN POTENSI DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

*Bambang*

**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

# Ecces

Economics, Social, and Development Studies

---

ANALISIS KEUNTUNGAN PETERNAK SISTEM GADUHAN DI DESA POGALAN KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG <i>Rohmat Putranto</i>	1
PENINGKATAN KAPASITAS USAHA MIKRO OLAHAN PANGAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA, JAWA TENGAH <i>Istiqomah, Krisnhoe Rachmi Fitrijati, Uswatun Hasanah</i>	32
PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA MELALUI INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI <i>Andi Ika Fahrika</i>	43
PENINGKATAN KUNTITAS PRODUKSI DAN KUALITAS SDM PADA KELOMPOK KERAJINAN BAMBU DESA SOMAKATON KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS <i>Sri Martini Dyah Perwita Sofiatul Khotimah</i>	71
PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DAN KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN <i>Zulkifli</i>	89
DETERMINAN INVESTASI PADA SEKTOR PERUMAHAN DI KOTA MAKASSAR PERIODE 2002-2013 <i>Siradjuddin dan Nurlaela</i>	106
PEMETAAN POTENSI DESA DI KABUPATEN BANYUMAS <i>Bambang</i>	123

## **PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DAN KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN**

Zulkifli<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional (UMR), dan Kontribusi Sektor Industri terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dengan bantuan SPSS 20.

Berdasarkan hasil analisis 1). Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan. 2). Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan.

**Kata kunci:** UMR, Kontribusi sektor industry, indeks gini

### **PENDAHULUAN**

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.<sup>2</sup>

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu

---

<sup>1</sup> STAIN Watampone, [nalling\\_jnp@ymail.com](mailto:nalling_jnp@ymail.com)

<sup>2</sup> Sofyan Yahya Putra, Istiana Asas, Syaiful Amar *Masalah Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan Di Indonesia* (Jurnal Ekonomika Pembangunan) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.

negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.<sup>3</sup>

Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Masalah distribusi pendapatan merupakan suatu ukuran atas pendapatan yang diterima oleh setiap masyarakat. Dalam mengukur distribusi pendapatan diukur dari 2 ukuran pokok yaitu, distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan personal dan distribusi fungsional yang mempertimbangkan individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Kemudian menurut Ahluwalia (1997) yang menggambarkan penerimaan pendapatan penduduk yaitu 40% penduduk menerima pendapatan paling rendah, 40% penduduk menerima pendapatan menengah dan 20% menerima pendapatan yang paling tinggi.<sup>5</sup>

Tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sektor-sektor usaha yang berkembang di daerah. Tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari perkembangan kinerja dan struktur perekonomian Sulawesi Selatan memang bahwa sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan cukup besar dalam perekonomian Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun tetap dimiliki oleh sektor pertanian, industri, jasa dan perdagangan. Namun meski memiliki proporsi yang cukup besar dalam

---

<sup>3</sup> Kholil Ashari, *Disparitas Distribusi Pendapatan Nasional* (jurnal Kajian Ekonomi Negara Berkembang) h. 61-70, 2010.

<sup>4</sup> Li, H., L. C. Xu and H. Zou, 'Corruption, Income Distribution, and Growth', (Jurnal Ekonomi dan Politik) Vol. 12, No. 2, h. 155-82, 2000.

<sup>5</sup> Todaro, *Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2000). h. 89.

perekonomian, sektor pertanian dan industri cenderung mengalami penurunan peran dari tahun ke tahun. Kecenderungan ini akan berakibat pada semakin seriusnya persoalan rendahnya kesempatan kerja dan pengangguran terbuka.

Kesempatan kerja di sektor-sektor seperti industri besar, konstruksi, perdagangan dan keuangan memang memberikan pendapatan dan nilai tambah yang tinggi namun ketersediaannya lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan yang didominasi oleh sektor primer, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan terutama antara perkotaan dengan pedesaan.

Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 telah berlalu, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir perekonomian Sulawesi Selatan terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang saat ini cukup memiliki prospek, namun disisi lain distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan masih timpang/besar.<sup>6</sup> Sehingga dilihat dari Gini Ratio berada pada ketimpangan yang cukup mengkhawatirkan, Hal ini dapat dilihat dari table 1 tentang perbandingan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan distribusi pendapatan untuk tahun 2008 s/d 2012, sebagai berikut :

**Tabel 1**  
Distribusi Pendapatan di Sul Sel Tahun 2008 – 2012

Tahun	Indeks Gini Sulawesi Selatan
2008	35%
2009	37%
2010	36%
2011	39%
2012	40%

Sumber : Data diolah dari BPS Sulsel, 2013

Berdasarkan tabel diatas terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk miskinnya semakin banyak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi sektor industri terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional., "*Statistik Indonesia*", [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=06&notab=15](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06&notab=15) (5 Mei 2013).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Distribusi Pendapatan

Distribusi Pendapatan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat. Dari perhitungan ini akan dapat dilihat porsi pendapatan nasional yang dikuasai oleh berapa persen dari penduduk. Gunanya untuk melihat seberapa besar penguasaan pendapatan nasional tersebut sehingga dapat diketahui apakah ada pendapatan nasional oleh segelintir orang atau terjadi pemerataan diantara penduduk di negara tersebut.<sup>7</sup>

Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapat antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Jika ketidakseimbangan terus terjadi antara kelompok kaya dan kaum miskin, maka perekonomian tersebut benar-benar menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata.<sup>8</sup>

Menurut Michael Todaro, Distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan analisis maupun untuk tujuan kuantitatif, yaitu:

1. Pendapatan "personal" atau distribusi pendapatan berdasarkan ukuran atau besarnya pendapatan. Distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan berdasarkan besarnya pendapatan paling banyak digunakan ahli ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima, dari mana pendapatan yang mereka peroleh tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan pula berapa banyak yang diperoleh masing-masing individu, apakah merupakan hasil dari pekerjaan mereka atau berasal dari sumber-sumber lain. Selain itu juga diabaikan sumber-sumber pendapatan yang menyangkut lokasi (apakah di wilayah menurut bagian faktor distribusi. Sistem distribusi ini desa atau kota) dan jenis pekerjaan.
2. Distribusi pendapatan "fungsional" atau distribusi pendapatan mempertimbangkan individu-individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah.

---

<sup>7</sup> Siradjuddin, *Pengantar Teori Ekonomi Makro* (Makassar, Alauddin University Press, 2012). h. 218

<sup>8</sup> <http://www.contohskripsitesis.com/backup/.../Distribusi%20Pendapatan.doc>

mengenai keadaan distribusi pendapatan di beberapa negara dapat digambarkan dalam 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan dan golongan ini didasarkan pada besar pendapatan yang mereka terima menggolongkan penduduk penerima pendapatan :
  1. 40 persen penduduk menerima pendapatan paling rendah
  2. 40 persen penduduk menerima pendapatan menengah
  3. 20 persen penduduk menerima pendapatan paling tinggi
- b. Distribusi pendapatan mutlak adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari padanya. Ukuran umum yang dipakai biasanya adalah kriteria Bank Dunia yaitu ketidakmerataan tertinggi bila 40 persen penduduk dengan distribusi pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan sedang apabila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan rendah bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan nasional.

Adapun Ayat yang menerangkan tentang distribusi pendapatan, yaitu :

عَلَى اللَّهِ أَقْبَاءَ مَا مِنْ رَسُولٍ فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلٌ وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينَ السَّبِيلَ وَابْنٌ يَكُونُ لَا كَيْ بَيْنَ دَوْلَةٍ مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءَ ءَاتَاكُمْ وَمَا الرَّسُولُ  
فَخَدُوهُ لِي نَهَاكُمْ وَمَا فَانْتَهُوا عَنْهُ اللَّهُ وَاتَّقُوا شَدِيدَ اللَّهِ إِنَّ الْعِقَابَ

Terjemahnya:

*“Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS al-Hasyr : 7).*

Makna ayat diatas menunjukkan bahwa islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara obyektif, islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta adanya hokum waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar.<sup>9</sup>

### **Dampak Distribusi Pendapatan**

Adapun dampak rendahnya tingkat distribusi pendapatan penduduk terhadap pembangunan adalah:

1. Rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan pembangunan bidang ekonomi kurang berkembang baik.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas.

Untuk meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat (kesejahteraan masyarakat), sehingga dapat mendukung lancarnya pelaksanaan pembangunan pemerintah melakukan upaya dalam bentuk :

- a. Menekan laju pertumbuhan penduduk
- b. Merangsang kemauan berwiraswasta
- c. Menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga/industrialisasi
- d. Memperluas kesempatan kerja
- e. Meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan barang dan jasa

### **Pengukuran Distribusi Pendapatan**

#### **Kurva Lorenz**

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri

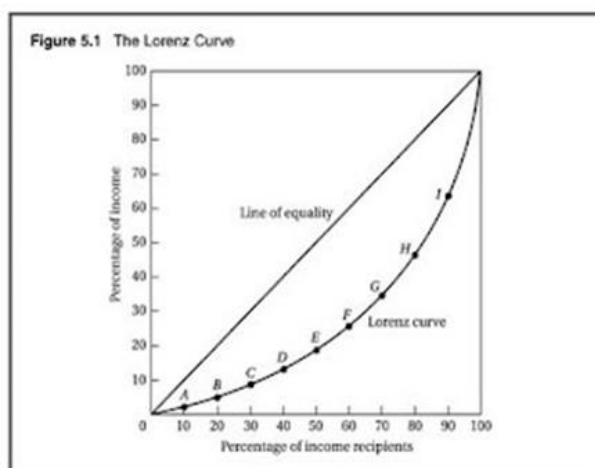
---

<sup>9</sup> Fatma Zahara, *Pemerataan distribusi pendapatan dalam perspektif islam*, 2012, h.150.



ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.<sup>10</sup>

**Gambar 1.** Kurva Lorenz



Sumber: Ridhoassegaf.blogspot.com, 2013

a. Koefisien Gini (Gini Indeks)

Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran yang menunjukkan apakah suatu negara atau daerah pendapatannya merata atau tidak. Angka indeks ini besarnya dari 0-1. Angka nol berarti tidak ada kesenjangan di negara atau daerah tersebut atau kemerataannya sempurna. Sedangkan angka 1 berarti negara atau daerah tersebut ketimpangannya sangat besar. Jika angka indeks gini lebih dari 0,5 berarti terjadi ketimpangan yang besar di negara atau daerah itu, sedang jika di bawah 0,5 ini berarti ketimpangannya kecil.

b. Kriteria Bank Dunia

Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan menengah, serta 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi

<sup>10</sup> Ikhsan, *Indikator-Indikator Makro Ekonomi*, Jakarta : Edisi 2 Lembaga Penerbit FE UI, 1995. h.125

pendapatan dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat apabila 40% penduduk miskin menikmati antara 12-17% pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk yang berpendapatan rendah menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak dan distribusi pendapatan nasional dianggap cukup merata.

### **Tinjauan Umum Tentang Upah Minimum Regional (UMR)**

Dalam teori ekonomi, upah dapat diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan.<sup>11</sup> Upah minimum merupakan upah minimum yang diizinkan dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja menurut undang-undang. Terdapat dua kelompok yang pro dan kontra tentang upah minimum ini, kelompok yang kontra mengatakan bahwa undang-undang upah minimum mengganggu kelancaran berfungsinya pasar tenaga kerja dan menciptakan pengangguran. Sedangkan para pendukungnya mengatakan bahwa upah minimum telah berhasil menaikkan upah pekerja paling miskin dan meringankan kemiskinan tanpa menciptakan banyak pengangguran.<sup>12</sup>

Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk region atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh masing-masing provinsi. Menurut Adit Agus Prasetyo (2010), Upah Minimum ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

#### **Upah Minimum Regional**

Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah

---

<sup>11</sup> Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen SDM & Ketenagakerjaan* (Bandung: Graha Ilmu, 2003) h. 86.

<sup>12</sup> Listya E. Artiani, *Upah Minimum Regional : Studi Kelayakan Kebijakan dan Penyesuaian*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia) Vol. 13, No.1 hal .31-41 , FE UII, Yogyakarta 1998.

minimum regional (UMR) dibedakan menjadi dua, yaitu Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II). Namun sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I (UMR Tk. I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten /Kota (UM kab/kota).

#### Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja :Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II). Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka terjadi perubahan istilah Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMS kab/kota). Kontroversi tentang upah minimum bukanlah isu baru. Perbedaan pendapat ini dapat dilihat dari perselisihan antara kelompok serikat pekerja yang menghendaki kenaikan upah minimum yang signifikan, sementara kelompok pengusaha melihat bahwa tuntutan ini bertentangan dan tidak kompatibel dengan upaya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.<sup>13</sup>

#### Tujuan Penetapan Upah Minimum

Menurut Hasanuddin Rachman, Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

---

<sup>13</sup> Haryo Kuncoro, " *Studi Kelayakan Kebijakan Penyesuaian Upah Minimum Regional*" Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 13 No. 1 hal. 31-41, BPFE, Yogyakarta 2001.

## 1. Secara Mikro

- 1) Sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot
- 2) Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan
- 3) Meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah.

## 2. Secara Makro

- 1) Pemerataan pendapatan
- 2) Peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja
- 3) Perubahan struktur biaya industri sektoral
- 4) Peningkatan produktivitas kerja nasional
- 5) Peningkatan etos dan disiplin kerja
- 6) Memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha

Berkaitan dengan masalah UMR Rasulullah saw. telah mengingatkan dalam hadistnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda:

الْقِيَامَةَ يَوْمَ حَصْمُهُمْ أَنَا ثَلَاثَةٌ , غَدَرَ ثُمَّ بِي أَعْطَى رَجُلٌ , ثُمَّ فَأَكَلَ حُرًّا بَاعَ رَجُلٌ  
أَجْرَهُ يُؤْفِهِ وَلَمْ مِنْهُ فَاسْتَوْفَى أَجِيرًا إِسْتَأْجَرَ وَرَجُلٌ

Artinya:

*“Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada khalifah) karena Aku, lalu berkhianat; orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya; serta orang yang mengontrak pekerja, kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya” (HR Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).*

Makna hadist di atas membahas manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan Tuhan kepadanya, Tuhan memberikan pada setiap orang haknya oleh karena itu jangan mengganggu apa yang dimiliki orang lain. Sementara adil terkait dengan interaksi relatif antara satu hal dengan hal lain, individu yang satu dengan individu yang lain, atau masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain, serta mencegah kezaliman yang terjadi dalam kontak kerja tersebut, maka Islam memberlakukan hukum-hukum yang tegas kepada siapa saja yang melakukan kezaliman, baik itu pengusaha maupun pekerja. Hukum-hukum itu diberlakukan agar tidak boleh ada kezaliman satu pihak terhadap pihak lainnya.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah 2009) h. 354.

### **Teori Yang Berkaitan Dengan Upah Minimum**

Teori oleh Stuart Mill yaitu, Upah dana buruh tidak perlu menantang seperti yang disarankan oleh teori undang-undang upah besi, karena upah yang diterimanya itu sebetulnya adalah berdasarkan kepada besar kecilnya jumlah dana yang ada pada masyarakat. Jika dana ini jumlahnya besar maka akan besar pula upah yang diterima buruh, sebaliknya kalau dana ini berkurang maka jumlah upah yang diterima buruh pun akan berkurang pula.<sup>15</sup>

Teori oleh David Ricardo yang menerangkan bahwa: Pertama, upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya. Kedua, di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat oleh ahli-ahli ekonomi modern, upah kodrat dijadikan batas minimum dari upah kerja.

### **Tinjauan Umum Tentang Sektor Industri**

Industri adalah bidang mata pencaharian yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Sedangkan perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.<sup>16</sup>

Selain itu, pengertian industri menurut undang-undang tentang perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah.

---

<sup>15</sup> Taufik Zainal Abidin, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kabupaten Asahan* (Jurnal Ekonomi Industri), Vol.02 - No.01 - 43 Universitas Negeri Medan, 2000.

<sup>16</sup> Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: Rajawali Press, 1999) h.134

Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya dan politik.

Sektor industri merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor ini tidak saja berpotensi mampu memberikan kontribusi ekonomi yang besar melalui nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, tetapi juga mampu memberikan kontribusi yang besar dalam transformasi struktural bangsa kearah modernisasi kehidupan masyarakat yang menunjang pembentukan daya saing nasional.<sup>17</sup>

Peranan industri dalam pertumbuhan wilayah secara jelas dikemukakan oleh Yeates dan Gardner, bahwa kegiatan industri merupakan salah satu faktor penting dalam mekanisme perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Hal ini disebabkan adanya efek multiplier dan inovasi yang ditimbulkan oleh kegiatan industri yang berinteraksi dengan potensi dan kendala yang dimiliki wilayah. Seorang pakar ekonomi Rusia (Rostow), juga mengatakan bahwa tahap tinggal landas dalam pembangunan ekonomi ditandai oleh pertumbuhan yang pesat pada satu atau beberapa sektor industri.<sup>18</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upah Minimum regional**

Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu, Upah mempunyai kedudukan yang strategis bagi tenaga kerja, perusahaan dan bagi pemerintah.. Bagi tenaga kerja itu upah digunakan untuk menghidupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, sedangkan bagi perusahaan upah salah satu sumber biaya dalam menentukan dan mempengaruhi produksi total perusahaan itu sendiri dan harga dari output suatu barang, sedangkan bagi pemerintah upah di gunakan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari tabel di bawah dapat dilihat Upah Minimum Regional(UMR) Sulawesi - Selatan dari tahun 2005 sampai tahun 2012 selalu mengalami peningkatan hal

---

<sup>17</sup> Siti Masyithoh, *Contribution Agricultural Sector to Growth of Economic* (Jurnal ekonomi pembangunan), Universitas Mulawarman Samarinda, EPP.Vol.1.No.2. hal.10-14, 2004.

<sup>18</sup> Rostow Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990).

ini disebabkan karena kebutuhan hidup pekerja selalu meningkat tiap tahunnya. Tahun 2005 UMR sebesar Rp. 455.000 menjadi Rp. 1.200.000 tahun 2012.

### Kontribusi Sektor industri

Sektor industri merupakan sektor yang juga sangat berperan dalam pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor industri juga memegang peranan penting sebagai faktor produktif dalam memaksimalkan pembangunan. Perkembangan sektor industri tidak hanya ditandai dari perkembangan volume produksi, melainkan juga oleh makin beranekaragamnya jenis produk yang dihasilkan serta mutu yang semakin meningkat. Sektor industri juga berperan dalam meningkatkan lapangan pekerjaan yang luas sehingga menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

**Tabel 2.**  
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2012

Tahun	PDRB	Pertumbuhan
2005	5.745.283.81	-
2006	6.527.538.81	13.61
2007	7.137.867.57	9.35
2008	8.245.336.39	15.51
2009	9.158.552.38	11.07
2010	11.060.440.24	20.76
2011	12.514.885.58	13.15
2012	14.457.258.62	15.52
2013	14.624.519.37	1.15
2014	15.088.357.88	3.17

Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi sector industry terhadap PDRB propinsi Sulawesi Selatan terlihat mengalami perkembangan yang berfluktuatif dimana pertumbuhan terbesar kontribusi sektor industri terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan yaiatu pada tahun 2010 yaitu sebesar 20.76% sedangkan pertumbuhan terendah yaitu pada tahun 2013 yaitu hanya tumbuh sebesar 1.15% .

### Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Berdasarkan data yang diperoleh indeks gini untuk provinsi Sulawesi selatan dari tahun 2003 hingga tahun 2012 dapat dilihat pada table. yang menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan masih relatif rendah. Meskipun demikian indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendekati batas ketimpangan untuk distribusi pendapatan sedang (antara 0,3 – 0,4) itu dapat dilihat dari ketimpangan gini ratio Provinsi Sulawesi pada tahun 2011 dengan indeks Gini sebesar 0,28 . selebihnya periode tahun 2003 sampai 2012 indeks gini mulai mencapai angka 0,3 sampai 0,4

**Tabel 3**  
Indeks Gini PDRB Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2014

Tahun	UMR
2005	0.34
2006	0.35
2007	0.37
2008	0.36
2009	0.39
2010	0.40
2011	0.28
2012	0.33
2013	0.38
2014	0.35

Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Jika dilihat dari tabel indeks gini unruk provinsi Sulawesi Selatan, terlihat bahwa indeks Gini provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun semakin memiliki trend menaik. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan karena disaat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sedang naik namun distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat malah semakin kurang merata.



### **Pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) dan Kontribusi sektor industri terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Propinsi Sulawesi Selatan**

Berdasarkan hasil olah data dimana nilai koefisien regresi sebesar -0.090 dan signifikansi sebesar 0.14 menyatakan bahwa Upah Minimum regional (UMR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan. setiap penambahan 1% Upah Minimum regional (UMR) maka ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.090% dan sebaliknya jika Upah Minimum regional (UMR) turun sebesar 1% maka ketimpangan distribusi pendapatan akan meningkat sebesar 0.090%. arah hubungan antara Upah Minimum regional (UMR) dengan ketimpangan distribusi pendapatan Propinsi Sulawesi Selatan adalah searah (-), dimana kenaikan atau penurunan Upah Minimum regional (UMR) akan mengakibatkan kenaikan dan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan Propinsi Sulawesi Selatan.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa UMR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, masih tingginya angka pengangguran di propinsi Sulawesi Selatan diduga sebagai penyebab kenaikan UMR tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan (gini ratio) di Sulawesi selatan, selain itu proporsi jumlah penduduk yang bekerja di Sulawesi selatan masih belum merata disejumlah daerah, mereka masih banyak yang bekerja di pedesaan dibandingkan di perkotaan, sehingga terjadi perbedaan penghasilan antar mereka yang bekerja di kota dan mereka yang bekerja di desa . mereka yang bekerja di perkotaan memiliki tingkat penghasilan yang tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja di pedesaan.

Teori Karl Marx (1787); Marx berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahap awal pembangunan akan menyebabkan kenaikan tingkat upah dari tenaga kerja selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital terhadap tenaga kerja sehingga terjadi penurunan terhadap permintaan tenaga kerja. Akibatnya timbul masalah pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan hanya pada tahap awal pembangunan, kemudian pada tahap selanjutnya akan terjadi sebaliknya.

Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jonna P. Estudillo (1997), Mun Musfidar (2011), Adrian Coto (2006), dimana Upah

Minimum Regional(UMR) berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

### **Pengaruh Kontribusi Sektor Industri terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan**

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien regresi sebesar - 0.103 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 menyatakan bahwa Kontribusi sektor industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan. setiap peningkatan 1% Kontribusi sektor industri maka ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar 0.103% dan sebaliknya jika Kontribusi Sektor Industri turun sebesar 1% maka ketimpangan distribusi pendapatan akan naik sebesar 0.103%. Para ekonom klasik, mengemukakan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan sector-sektor ekonomi) akan selalu cenderung mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan walaupun masih dalam tahap awal pertumbuhan. Bukti empiris dari pandangan ini berdasarkan pengamatan di beberapa negara seperti Taiwan, Hongkong, Singapura, RRC. Kelompok Neo klasik sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada prakteknya cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

Hasil studi menunjukkan indikasi bahwa kontribusi sektor industri berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan. Meningkatnya kontribusi sektor industri Propinsi Sulawesi terhadap PDRB, menunjukkan semakin banyak populasi penduduk yang bekerja disektor industry dengan demikian terjadi percepatan pembangunan maka masyarakat yang tadinya bekerja disektor pertanian pelan-pelan mulai beralih ke sektor industri, hal ini akan menyebabkan distribusi pendapatan semakin merata.

Hasil studi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jonna P. Estudillo (1997), Mun Musfidar (2011), Adrian Coto (2006), Mudrajad Kuncoro (2006) dimana kontribusi sector industry berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, Upah Minimum Regional (UMR) Sulawesi Selatan pada penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua, kontribusi sektor industri di Sulawesi selatan pada penelitian ini menunjukkan pengaruh Negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Statistik Indonesia*. Jakarta
- Departemen Agama RI, 2009. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Jakarta.
- Fatma Zahara, 2012 *Pemerataan distribusi pendapatan dalam perspektif islam*, Erlangga. Jakarta
- Ikhsan, 1995. *Indikator-Indikator Makro Ekonomi*, Edisi 2 Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.
- Haryo Kuncoro, 2001. *Studi Kelayakan Kebijakan Penyesuaian Upah Minimum Regional* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 13 No. 1 hal. 31-41, BPFE, Yogyakarta.
- Jhingan, M.L. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* Rajawali Press Jakarta
- Kholil Ashari, 2010. *Disparitas Distribusi Pendapatan Nasional* ( jurnal Kajian Ekonomi Negara Berkembang)
- Li, H., L. C. Xu and H. Zou, 2000. *Corruption, Income Distribution, and Growth*, (Jurnal Ekonomi dan Politik) Vol. 12, No. 2,
- Listya E. Artiani, 1998. *Upah Minimum Regional : Studi Kelayakan Kebijakan dan Penyesuaian*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia) Vol. 13, No.1, FE UII, Yogyakarta.
- Rostow Jhingan, 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siradjuddin, 2012. *Pengantar Teori Ekonomi Makro* Alauddin University Press. Makassar.
- Siti Masyithoh, 2004. *Contribution Agricultural Sector to Growth of Economic* (Jurnal ekonomi pembangunan), Universitas Mulawarman Samarinda, EPP.Vol.1.No.2.
- Sonny Sumarsono, 2003 *Ekonomi Manajemen SDM & Ketenagakerjaan* Graha Ilmu. Bandung
- Taufik Zainal Abidin, 2000 *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kabupaten Asahan* (Jurnal Ekonomi Industri), Vol.02 - No.01 - 43 Universitas Negeri Medan.
- Todaro, 2000 *Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga* Penerbit Erlangga. Jakarta